

# LAPORAN

**TAHUN 2024**

**LAPORAN SINERGITAS DAN  
HARMONISASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN MANUSIA URUSAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

**BAPPERIDA**

## DAFTAR ISI

	halaman
1. Daftar Isi .....	i
2.. KATA PENGANTAR .....	ii
3. BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
4. BAB 2 SINKRONISASI PERENCANAAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA URUSAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	
5. BAB 3 CAPAIAN KINERJA PERENCANAAN.....	33
6. BAB 4 PENUTUP .....	42

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah dilimpahkan kepada kita semua , sehingga penyusunan yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga Penyusunan laporan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan manusia Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam Penyusunan laporan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan manusia Tahun 2024 menggunakan dan mengolah data serta informasi yang bersumber dari beberapa SKPD serta lembaga / organisasi di Pemerintahan Kota Samarinda.

Kepada semua OPD serta semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini , kami sebagai penulis mengucapkan terima kasih.

semoga Penyusunan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan manusia Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi kita semua , baik untuk Perencanaan , penempatan , evaluasi khususnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

Samarinda, Desember 2024

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### **Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Pembangunan Manusia**

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable development). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan (growth), perbaikan (improvement), dan perubahan (change). Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pada UU tersebut dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RPKD) dengan periode 1 (satu) tahun. Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat pusat dan daerah. Dalam rangka mendukung proses perencanaan di bidang pembangunan manusia maka dilaksanakan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Melalui sub kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisir permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi serta peningkatan sinergitas proses perencanaan. Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia adalah upaya untuk mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana strategis, dan rencana kerja perangkat daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan sinergitas pembangunan manusia terhadap fungsi perencanaan antar bidang. Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang penting dan strategis karena dapat menunjukkan arah daerah dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreatifitas. Sinergitas berasal dari

kata Sinergi Mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yg dpt menghasilkan produk lebih baik atau lebih besar dibandingkan jika dikerjakan sendiri sendiri. sinergisitas/sinergisme/sinergitas adalah kegiatan gabungan atau kerjasama yg dilakukan oleh beberapa unsur guna mendapatkan hasil yg lebih baik dan lebih maksimal. Sinergisitas tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja melainkan dg dua atau lebih, bisa puluhan bahkan ratusan orang sesuai kebutuhan. Sedangkan harmonisasi merupakan suatu tahapan yang dilakukan untuk mencari kesesuaian atau keselarasan pada Peraturan Perundang-undangan yang sedang disusun. Harmonisasi bertujuan agar Peraturan Perundang-undangan yang sedang disusun memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan rasa perlindungan terhadap target peraturan tersebut. Harmonisasi juga dimaksudkan untuk mengurangi tumpang tindih Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan teleologi hukum harmonisasi, tujuannya adalah meminimalkan ego sektoral, menguatkan koordinasi dan kebersamaan, mencegah deharmonisasi, dan meningkatkan kualitas perundang-undangan yang akan dihasilkan. Untuk itu, dalam metode harmonisasi ini harus dilakukan dengan menyelaraskan dengan Pancasila, UUD 1945, perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat dengan norma yang akan disusun, sehingga sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan merupakan kolaborasi antar berbagai sektor dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Dengan harmonisasi, roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dengan sinergitas lintas

kabupaten/kota juga perlu dilakukan. “Sinergitas pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini penting dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat. Sesuai prinsip-prinsip pembangunan yang holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, serta dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pembangunan adalah hasil kegiatan dan program pemerintah yang dirancang untuk mendukung masyarakat mencapai kesejahteraan sosial, tujuan sosial ekonomi, demografi politik, dll. Dengan meningkatkan pembangunan. Implementasi adalah kebiasaan atau strategi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

Pembangunan diharapkan mampu untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pembangunan harus dilaksanakan di segala bidang secara menyeluruh. Pembangunan melalui peningkatan peran dalam mengatasi permasalahan kemiskinan,kependudukan,pemberdayaan ,kesehatan,bencana,keluarga yang akan diselaraskan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan dalam RPJMD 2021-2026.

## **Maksud dan Tujuan**

Tujuan disusunnya Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Manusia Urusan Kesejahteraan Sosial, adalah untuk :

1. Memberikan Gambaran tentang kondisi umum kesejahteraan sosial Kota Samarinda dalam Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan manusia urusan kesejahteraan masyarakat
2. Mewujudkan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang pembangunan manusia urusan kesejahteraan masyarakat

## **Sistematika Penulisan**

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
- BAB III : Capaian Kinerja Perencanaan
- BAB IV : Kesimpulan dan Saran

## **BAB 2**

### **SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

#### **2.1. Visi Misi Kota Samarinda**

Berpedoman pada arah pembangunan kota samarinda sebagaimana termuat dalam RPJPD kota samarinda 2005-2025, yang mana Visi pembangunan kota samarinda yang ingin diwujudkan dalam RPJPD 2005-2025 adalah: **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA TEPIAN YANG TERDEPAN DI KALIMANTAN “**

Dalam pencapaian visi tersebut akan dijabarkan dalam RPJMD yang mana pada tahun ini memasuki periode RPJMD tahun 2021-2026 yakni dengan Visi **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**

Adapun Misi yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya;
- (2) Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
- (3) Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat ;
- (4) Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.

(5) Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

1. Misi 1 : Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya Masyarakat Kota Samarinda yang religius taat serta patuh dalam menjalankan agama yang baik. Masyarakat yang unggul dimana mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas melalui pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Diharap dengan SDM unggul dapat menjadi penentu kemajuan ekonomi, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda. Masyarakat yang berbudaya memiliki semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi. Misi 1 ini bertujuan untuk mewujudkan kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing. Kota Samarinda akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga, meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender, meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal. Program Unggulan (PU) dalam misi pertama yang dirumuskan adalah PU 1 Program Pemberdayaan RT (Alokasi Rp 100 juta – Rp 300 juta) per RT per tahun); PU 4 Program Social Security Number (satu kartu untuk semua layanan); PU5 Program Smart City plus; PU6 Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita; PU 7 V-5 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Program bantuan peralatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun .

2. Misi 2 : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan Misi 2 ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi juga untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Dalam mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan Kota Samarinda akan berupaya meningkatkan pembangunan sektor tersier, meningkatkan kewirausahaan baru, meningkatkan jumlah dan nilai investasi, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, meningkatkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Program Unggulan yang dirumuskan adalah PU 1 Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun); PU 4 Program social security number (satu kartu untuk semua layanan); PU 8 Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan) ;PU 10 Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (star up).
3. Misi 3 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi Misi 3 mempunyai tujuan menciptakan tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif dan efektif. Pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dapat terwujud dengan meningkatkan sistem pelayanan publik, reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan, penguatan kapasitas ketertiban,

ketenteraman dan perlindungan masyarakat dan meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan karakter kebangsaan. Dengan program unggulan PU 4 Program social security number dan PU 5 Program smart city plus.

4. Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern

Misi 4 bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi. Infrastruktur yang mantap dan modern akan diwujudkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana jalan serta jembatan yang mantap. Didukung juga dengan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai. Dan yang menjadi impian Kota Samarinda dapat mewujudkan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi kereta api. Dengan Program Unggulan PU 2 Program Pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern dan PU 3 Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan.

5. Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari Adapun tujuan dari misi 5 yaitu mewujudkan kota yang tangguh dan berkelanjutan. Sebuah kota yang baik harus mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga atau penduduk yang tinggal didalamnya. Kota Samarinda akan mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari untuk dijadikan tempat hunian dan sebagai persiapan daerah penyangga IKN. Strategistrategi akan dilaksanakan untuk meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas, meningkatkan kebersihan,

meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi resiko bencana dan perubahan iklim, meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni serta mengintegrasikan sarana prasarana sumber daya air. Dengan Program Unggulan PU 2 Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern; PU 5 Program Smart City Plus dan PU 9 Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground. Selanjutnya sebagai perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 akan ditetapkan dengan dilengkapi oleh indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja yang terukur ini juga sekaligus menjadi titik tolak berhasil atau tidaknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda selama masa jabatan berlangsung.

Pada Bab ini akan dilakukan sinkronisasi perencanaan bidang pembangunan manusia terhadap 6 SKPD yang berada dalam sub.bidang Kesejahteraan masyarakat Bappedalitbang Kota Samarinda.

1. Dinas Sosial
2. Dinas Kesehatan
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Tabel 2.1. Misi, Tujuan, dan Sasaran Kota Samarinda

No	MISI/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
<b>Misi 1 : Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya</b>		
1.1	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	IPM
1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup
1.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka Harapan lama sekolah
		Rata-rata lama sekolah
1.1.3	Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda

No	MISI/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1.1.4	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	IPG
1.1.5	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan
<b>Misi 2 : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan</b>		
<b>2.1</b>	<b>Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi</b>	<b>Pertumbuhan ekonomi</b>
2.1.1	Meningkatnya pembangunan sektor tersier	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
2.1.2	Meningkatnya kewirausahaan baru	Jumlah peningkatan pelaku

No	MISI/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
		kewirausahaan
2.1.3	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Realisasi investasi
2.1.4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
2.1.5	Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Skor PPH (%)
		Presentase ketersediaan Energi 2.400 (kkal/kap/hr)
		Presentase ketersediaan Protein 63 (gr/kap/hr)
2.2	Menurunnya penduduk miskin	Angka kemiskinan

No	MISI/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
2.2.1	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Angka PMKS
2.2.2	Meningkatnya lapangan pekerjaan	Angka Pengangguran terbuka
<b>Misi 3 :Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi</b>		
3.1	<b>Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsive, efektif</b>	<b>Indeks reformasi birokrasi</b>
3.1.1	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik
	Meningkatnya pelayanan yang akuntabel	Nilai LPPD
3.1.3	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase Perda dan Perkada yang di

No	MISI/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
		tegakkan
<b>Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern</b>		
4.1	Terwujudnya infrastruktur yang terintegrasi, strategis, dan memiliki daya ungkit dalam arah pengembangan kota	<b>Rasio konektivitas kabupaten/kota</b>
4.1.1	Mengintegrasikan sarana dan prasarana pengendalian banjir	Jumlah titik genangan banjir
4.1.2	Meningkatkan aksesibilitasinter dan antar wilayah kota	Porsi panjang jaringan jalan kondisi baik (%)
4.1.3	Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan dan sistem transportasi yang terpadu dan modern	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota

No	MISI/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
4.1.4	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar secara kuantitas dan kualitas	Cakupan layanan air bersih
4.1.5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni	Persentase Rumah Layak Huni
<b>Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari</b>		
5.1	Terwujudnya Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan	Penghargaan Adipura
5.1.1	Meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas	Persentase tersedianya luasan RTH
5.1.2	Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni	Persentase luas kawasan perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU

No	MISI/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
5.1.3	Meningkatnya kebersihan wilayah kota	Persentase pengelolaan sampah
5.1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
5.1.5	Mengurangi resiko bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah
5.1.6	Terintegrasinya sarana prasarana sumber daya air	Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang

## **2.2. Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SKPD dengan Visi Misi Kota Samarinda**

Berdasarkan data dari masing-masing Perangkat Daerah terpilih, akan ditinjau keselarasan Program ,kegiatan dan sub kegiatan masing-masing Perangkat Daerah terhadap Visi Misi Kota Samarinda yang telah ditetapkan. Keselarasan tersebut dapat tercermin dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada program kegiatan, akan tampak apakah program tersebut mendukung Visi Misi Kota atau tidak. Perangkat Daerah yang berada dalam koordinasi Bidang Pembangunan Manusia sub Kesejahteraan Masyarakat :

1. Dinas Sosial
2. Dinas Kesehatan
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

## 2.2.1. Dinas Sosial

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
MISI 2 : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan	
Menurunnya penduduk miskin	Angka kemiskinan
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Angka PMKS

Kemiskinan	Indikator Kemiskinan di Kota Samarinda		
	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	42.84	41.95	41.89
Persentase Penduduk Miskin (P0)	4.99	4.85	4.81
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.07	0.59	0.75
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.32	0.13	0.16
Garis Kemiskinan (Rupiah)	750,055	784,198	850,842

### ANGGARAN BELANJA TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kota	0.00
			Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota	500,000,000
			Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	4,077,120,000
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	100,000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	691,250,000

			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	424,400,000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	525,000,000
			Penyediaan Alat Bantu	275,000,000
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk	15,000,000

			Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	15,000,000
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	25,000,000
			Pemberian Layanan Kedaruratan	70,000,000
			Pemberian Layanan Rujukan	50,000,000
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50,000,000

		NAPZA di Luar Panti Sosial		
			Pemberian Layanan Kedaruratan	25,088,632
			Penyediaan Permakanan	600,000,000
			Penyediaan Sandang	250,000,000
			Penyediaan Alat Bantu	100,000,000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50,000,000
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	75,000,000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Penyediaan Makanan	200,000,000

		dan Sosial Kabupaten/Kota		
			Penyediaan Sandang	100,000,000
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	110,000,000

### 2.2.2. Dinas Kesehatan

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
<b>MISI 1 :</b>  Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup

Indikator IPM	Indeks Pembangunan Manusia				
	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup	74.27	74.54	74,56	75,27	75,51
Harapan Lama Sekolah	14.89	15.09	15,10	15,39	15,40

Rata-Rata Lama Sekolah	10.48	10.49	10,71	10,93	10.95
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun)	-	14.582	15.162	15.610	16.160
IPM	80,11	80.76	81,43	82,32	82,81

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3,138,888,251
2			<u>Pengembangan Rumah</u> <u>Sakit</u>	10,500,000,000
3			<u>Pembangunan</u> <u>Puskesmas</u>	43,038,141,614
4			<u>Rehabilitasi dan</u> <u>Pemeliharaan</u> <u>Puskesmas</u>	5,000,000,000
5			<u>Pengadaan</u> <u>Alat</u>	4,481,067,500

			<u>Kesehatan/Alat</u> <u>Penunjang Medik</u> <u>Fasilitas Pelayanan</u> <u>Kesehatan</u>	
6			<u>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</u>	10,724,604,500
7			<u>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat</u> <u>Kesehatan/Alat</u> <u>Penunjang Medik</u> <u>Fasilitas Pelayanan</u> <u>Kesehatan</u>	232,700,000
8		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<u>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</u>	4,200,093,120
9			<u>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</u>	785,846,000

10			<u>Pengelolaan Pelayanan</u> <u>Kesehatan Bayi Baru</u> <u>Lahir</u>	1,055,709,382
11			<u>Pengelolaan Pelayanan</u> <u>Kesehatan Balita</u>	537,650,000
12			<u>Pengelolaan Pelayanan</u> <u>Kesehatan pada Usia</u> <u>Pendidikan Dasar</u>	1,508,890,000
13			<u>Pengelolaan Pelayanan</u> <u>Kesehatan pada Usia</u> <u>Produktif</u>	350,000,000
14			<u>Pengelolaan Pelayanan</u> <u>Kesehatan pada Usia</u> <u>Lanjut</u>	383,640,00
15			<u>Pengelolaan Pelayanan</u> <u>Kesehatan Penderita</u> <u>Hipertensi</u>	750,000,000
16			<u>Pengelolaan Pelayanan</u> <u>Kesehatan Penderita</u> <u>Diabetes Melitus</u>	1,771,153,858
17			<u>Pengelolaan Pelayanan</u>	150,000,000

			<u>Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</u>	
18			<u>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</u>	3,011,734,500
19			<u>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</u>	975,900,000
20			<u>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</u>	100,000,00
21			<u>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana</u>	100,000,000

22			<u>Pengelolaan Pelayanan</u> <u>Kesehatan Gizi</u> <u>Masyarakat</u>	11,270,834,000
23			<u>Pengelolaan Pelayanan</u> <u>Kesehatan Kerja dan</u> <u>Olahraga</u>	206,000,000
24			<u>Pengelolaan Pelayanan</u> <u>Kesehatan Lingkungan</u>	1,419,890,000
25			<u>Pengelolaan Pelayanan</u> <u>Promosi Kesehatan</u>	1,265,675,000
26			<u>Pengelolaan Pelayanan</u> <u>Kesehatan Tradisional,</u> <u>Akupunktur, Asuhan</u> <u>Mandiri, dan Tradisional</u> <u>Lainnya</u>	150,000,000
27			<u>Pengelolaan Surveilans</u> <u>Kesehatan</u>	1,998,392,000
28			<u>Pengelolaan Pelayanan</u> <u>Kesehatan Orang</u> <u>dengan Masalah</u> <u>Kesehatan Jiwa (ODMK)</u>	100,000,00

29			<u>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</u>	100,000,00
30			<u>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</u>	6,415,517,998
31			<u>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</u>	53,710,776,000
32			<u>Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat</u>	500,000,000
33			<u>Operasional Pelayanan Puskesmas</u>	4,248,588,000
34			<u>Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</u>	419,152,000
35			<u>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota</u>	397,512,000
36			<u>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian</u>	1,549,791,000

			<u>Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</u>	
37			<u>Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</u>	50,000,000
38			<u>Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</u>	6,200,000,000
39			<u>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</u>	1,193,600,000
40		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<u>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya</u>	260,000,000
41			<u>Peningkatan Mutu</u>	50,000,000

			<u>Pelayanan Fasilitas Kesehatan</u>	
42	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	<u>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar</u>	220,000,000.
43	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<u>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</u>	263,730,000
44			<u>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</u>	420,887,000

			<u>dan Nomor P-IRT</u> <u>sebagai Izin Produksi,</u> <u>untuk Produk Makanan</u> <u>Minuman Tertentu yang</u> <u>dapat Diproduksi oleh</u> <u>Industri Rumah Tangga</u>	
45			<u>Pemeriksaan Post</u> <u>Market pada Produk</u> <u>Makanan-Minuman</u> <u>Industri Rumah Tangga</u> <u>yang Beredar dan</u> <u>Pengawasan serta</u> <u>Tindak Lanjut</u> <u>Pengawasan</u>	273,514,000
46	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	<u>Peningkatan Upaya</u> <u>Promosi Kesehatan,</u> <u>Advokasi, Kemitraan</u> <u>dan Pemberdayaan</u> <u>Masyarakat</u>	100,000,000

		Kabupaten/Kota		
47			<u>Penyelenggaraan</u> <u>Promosi Kesehatan dan</u> <u>Gerakan Hidup Bersih</u> <u>dan Sehat</u>	215,000,000
48			<u>Bimbingan Teknis dan</u> <u>Supervisi</u> <u>Pengembangan dan</u> <u>Pelaksanaan Upaya</u> <u>Kesehatan Bersumber</u> <u>Daya Masyarakat</u> <u>(UKBM)</u>	989,588,826
49			<u>Operasional Pelayanan</u> <u>Rumah Sakit</u>	7,344,873,713

### 2.2.3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
<b>MISI 5 :</b>  <b>Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman,</b>	

harmoni dan lestari	
Mengurangi resiko bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<u>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)</u>	268,600,000.
2			<u>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</u>	250,000,000
3			<u>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</u>	350,000,000
4		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<u>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</u>	810,000,000
5			<u>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</u>	387,043,000
6			<u>Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota</u>	1,200,000,000
7			<u>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</u>	949,593,054
8			<u>Penyusunan Rencana Kontijensi</u>	250,000,000.

9			<u>Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</u>	831,474,650
---	--	--	---	-------------

#### 2.2.4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
<b>MISI 3 :</b>  <b>Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi</b>	
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	<u>Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan</u>	385,600,000
2			<u>Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</u>	826,000,000
3			<u>Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan</u>	500,000,000

			<u>Kebutuhan</u>	
4			<u>Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting</u>	692,942,500
5	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	<u>Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan</u>	340,000,000
6			<u>Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan</u>	400,000,000
7			<u>Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</u>	661,000,000
8			<u>Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan</u>	525,000,000
9			<u>Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat</u>	270,000,000
10			<u>Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi</u>	275,000,000

			<u>Administrasi</u> <u>Kependudukan</u>	
11	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	<u>Penyusunan Profil Data</u> <u>Perkembangan dan</u> <u>Proyeksi Kependudukan</u> <u>serta Kebutuhan yang</u> <u>lain</u>	150,129,000

### 2.2.5. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
<b>MISI 1 :</b> <b>Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya</b>	
Terwujudnya kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing	IPM
Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	IPG

Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender & (IPG menggunakan UHH )	
	2022	2023
IPM Laki-Laki	85.68	86.51
IPM Perempuan	76.9	77.92
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<b>89.75</b>	<b>90.07</b>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	<u>Koordinasi dan</u> <u>Sinkronisasi</u> <u>Pelaksanaan PUG</u> <u>Kewenangan</u> <u>Kabupaten/Kota</u>	103,223,460
2			<u>Advokasi Kebijakan</u> <u>dan Pendampingan</u> <u>Pelaksanaan PUG</u> <u>termasuk PPRG</u>	241,672,000
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	<u>Advokasi Kebijakan</u> <u>dan Pendampingan</u> <u>Peningkatan</u> <u>Partisipasi</u> <u>Perempuan dan</u> <u>Politik, Hukum,</u> <u>Sosial dan Ekonomi</u>	433,356,000
4			<u>Penyediaan Layanan</u> <u>Pengaduan</u> <u>Masyarakat bagi</u> <u>Perempuan Korban</u>	500,000,000

			<u>Kekerasan</u> <u>Kewenangan</u> <u>Kabupaten/Kota</u>	
5			<u>Penyediaan</u> <u>Kebutuhan Spesifik</u> <u>bagi Perempuan</u> <u>dalam Situasi</u> <u>Darurat dan Kondisi</u> <u>Khusus Kewenangan</u> <u>Kabupaten/Kota</u>	122,239,500
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	<u>Penyediaan Data</u> <u>Gender dan Anak di</u> <u>Kewenangan</u> <u>Kabupaten/Kota</u>	220,000,000
7			<u>Advokasi Kebijakan</u> <u>dan Pendampingan</u> <u>Pemenuhan Hak</u> <u>Anak pada Lembaga</u> <u>Pemerintah, Non</u>	98,000,000

			<u>Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</u>	
9			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kotaa	402,480,000
10			<u>Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</u>	150,000,000

## 2.2.6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
MISI 2 :  Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan	
Menurunnya penduduk miskin	Angka kemiskinan
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Angka PMKS

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	<u>Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)</u>	200,000,00
2.			<u>Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi</u>	735,360,000

			<u>Keluarga/UPPKS)</u>	
3.			<u>Orientasi dan Pelatihan Teknis</u> <u>Pengelola Ketahanan dan</u> <u>Kesejahteraan Keluarga (BKB,</u> <u>BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan</u> <u>Pemberdayaan Ekonomi</u> <u>Keluarga/UPPKS)</u>	1,080,000,000
4.			<u>Penyediaan Biaya Operasional</u> <u>bagi Pengelola dan Pelaksana</u> <u>(Kader) Ketahanan dan</u> <u>Kesejahteraan Keluarga (BKB,</u> <u>BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan</u> <u>Pemberdayaan Ekonomi</u> <u>Keluarga/UPPKS)</u>	360,500,000
5.			<u>Pelaksanaan Peningkatan</u> <u>Kapasitas Mitra dan Organisasi</u> <u>Kemasyarakatan dalam</u> <u>Pengelolaan Program</u> <u>Ketahanan dan Kesejahteraan</u> <u>Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,</u> <u>PIK-R dan Pemberdayaan</u> <u>Ekonomi Keluarga/UPPKS)</u>	344,792,500

### BAB 3

#### CAPAIAN KINERJA PERENCANAAN

Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas Triwulan 3 pada Tahun

2024 adalah :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya

Tujuan : Terwujudnya kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing

NO	Program	Indikator	Target	Pagu	Realisasi (%)	
					Kinerja	Keuangan
<b>Misi 1 :Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya</b>						
<b>Sasaran :Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>						
<b>Dinas Kesehatan</b>						
<b>1</b>	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0.57%	235,697,836,011	0,48 (84,21%)	68,965,936,369
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0.63%		2,01 (100%)	
<b>2</b>	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	60%	5,413,645,000	26 (43%)	1,491,678,486
<b>3</b>	Program	Persentase	100%	917,716,000	50	56,700,000

	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Tersedianya Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan, dan Makanan yang terjamin aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin ketersediaa n dan keterjangak auan nya			(50 %)	
		Persentase Rekomenda si yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	20,69 %		10 (48,33%)	
<b>4</b>	Program Pemberdaya an Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Menurunny a Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	10,5%	1,141,200,00	10,5 (100%)	671,819,500
	<b>Dinas Dalduk KB</b>					
<b>5</b>	Program Pengendalia n Penduduk	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita	1,93%	2,656,405,000	1 (51,81%)	877,495,550

		Usia Subur (15- 49 Tahun)				
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15- 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	65,46 %	10,461,666,000	59 (90,35%)	3,697,692,225
<b>Sasaran :Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender</b>						
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						
7	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	68,67%	1,124,223,260	0	477,776,460
8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perkawinan anak	100%	572,427,000	0	325,597,981
9	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	4 dokumen	250,000,000	2 (50%)	117,594,500
10	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,036	1,191,747,500	0,01 (33,89 %)	625,382,171

11	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Kota Layak Anak (KLA)	800 s/d 900	1,120,000,000	0	546,291,300
12	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	1,70 %	644,000,000	0	349,553,002
<b>Misi 2 : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan</b>						
<b>Menurunnya kemiskinan dan pengangguran</b>						
<b>Meningkatnya kesejahteraan sosial</b>						
<b>Dinsos dan Pemberdayaan Sosial</b>						
13	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,46%	6,221,755,000	0	3,290,020,502
14	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial Skala Kab/Kota	2,44%	1,558,950,000	75 (100%)	677,294,269
15	Program Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase (%) Warga Migran yang Mendapatkan Penanganan	80	80,000,000	64 (80%)	17,191,840
16	Program	Persentase	2,40	3,280,000,000	11,90	1,273,370,359

	Rehabilitasi Sosial	(%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan gelandangan pengemis terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).			(100%)	
<b>17</b>	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	92,74	3,280,000,000	80 86,26%	1,273,370,359
Misi 3 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi						
Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsive, efektif						
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat						
<b>18</b>	Program Pendaftaran Penduduk (CAPILDUK)	Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda	97	1,250,000,000	99,20 100%	1,007,786,658
<b>19</b>	Program	Presentase	70	1,312,500,000	95,40	807,362,500

	Pencatatan Sipil (CAPILDUK)	Kepemilikan Akte Penduduk Kota Samarinda			100%	
<b>20</b>	Program Pengelolaan Profil Kependudukan (CAPILDUK)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Profil Kependudukan	1 dokumen	275,000,000	100%	48,138,750
<b>Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari</b>						
<b>Terwujudnya Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan</b>						
<b>Mengurangi resiko bencana dan perubahan iklim</b>						
<b>21</b>	Program Penanggulangan Bencana (BPBD)	Persentase Masyarakat yang mendapat Sosialisasi, Edukasi, dan Informasi	47,96	11,029,124,590	30 62,55%	4,103,830,101
		Persentase Jumlah korban terdampak bencana yang dapat dibantu, ditolong, dan dievakuasi dengan sarana prasarana kedaruratan	49,82			
<b>22</b>	Program penanganan bencana (Dinsos PM)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhiny	100	701,250,000	0,4 0,4%	493,945,059

		a kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota				
--	--	---	--	--	--	--

Beberapa kinerja indikator program dalam pencapaian visi misi yang ada dibawah koordinasi urusan Kesmas 6 OPD belum mencapai 100% hal ini dikarenakan masih terdapatnya data yang yang di entri dan masih berjalan ke semester 2 pelaksanaan hasil pencapaian sepanjang tahun 2024.

RPJMD PERUBAHAN 2021-2026

**VISI “TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**

Misi 1 Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya

Tujuan :Terwujudnya kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing

Indikator Tujuan: IPM

Target RPJMD	2023	2024	2025	2026
IPM	82,14	82,77	83,40	83.97
	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
Kota	2021	2022	2023	2024
Samarinda	80.76	81.43	82.32	82.81
Kalimantan Timur	76.88	77.44	78.20	78.83

Sumber data : BPS Kaltim

Target RPJMD pencapaian IPM tahun 2024 tercapai dengan persentase sebesar 82.81 %.

Target RPJMD	2023	2024	2025	2026
IPG	89,44	89,45	89,4689,47	

Sumber data : BPS Samarinda

Target RPJMD pencapaian IPG tahun 2024 tercapai dengan persentase sebesar 89.91 %.

Misi 2 :Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan

Tujuan 2 : Menurunnya kemiskinan dan pengangguran

Indikator : Tingkat kemiskinan

Target RPJMD	2023	2024	2025	2026
Tingkat kemiskinan	4,68	4,50	4,36	4,21

Kemiskinan	Indikator Kemiskinan di Kota Samarinda			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	42.84	41.95	41.89	-
<b>Persentase Penduduk Miskin (P0)</b>	<b>4.99</b>	<b>4.85</b>	<b>4.81</b>	<b>4.30</b>
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.07	0.59	0.75	0.54
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.32	0.13	0.16	0.11

Sumber data : BPS Kaltim (Statistik Daerah tahun 2024)

Target RPJMD pencapaian IPM tahun 2024 tercapai dengan persentase sebesar 4.30 %

Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

Tujuan : Terwujudnya Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan

Indikator Tujuan 2 : Indeks Resiko Bencana

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target RKPD	Capaian Kinerja	Tingkat capaian kinerja	Target RKPD	Capaian Kinerja*	Tingkat capaian kinerja
Meningkatnya kapasitas kota tangguh	Indeks Resiko Bencana	Poin	389,02	385,68	99,14	85,05	385,68	453,47

Target RPJMD pencapaian indeks resiko bencana tahun 2024 tercapai dengan poin 385.68 dan tingkat keberhasilan 100%.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Manusia perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi dan mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan dalam merencanakan dan melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Untuk terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/OPD/Institusi Lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang pembangunan manusia, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, dalam mendukung proses perencanaan, pengambilan kebijakan dan strategi pelaksanaan perencanaan pembangunan. Evaluasi terhadap target program yang ada di OPD berdasarkan rencana yang dibuat dalam dokumen perencanaan (RPJMD) adalah hal mutlak yang harus dilakukan untuk menetapkan target tahun berjalan dan tahun rencana, sehingga tujuan pembangunan kota samarinda dapat tercapai memberikan sumbangsih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.